



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRI YUSTINA SARI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **996107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOBIL, SUZUKI LGCC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 177.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.376.059

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 624.876.059

III. HUTANG Rp. 579.766.322

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 45.109.737

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.